

METODOLOGI RISET KEBIJAKAN PUBLIK

DR. NOVITA TRESIANA

PERTEMUAN 2

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. KEMAMPUAN dalam menjelaskan berbagai pendekatan dalam metodologi penelitian
2. KEMAMPUAN mengembangkan instrumen penelitian/kajian.
3. KEMAMPUAN MENGUASAI berbagai teori mengenai metodologi penelitian, JUGA mempraktikkan kemampuannya tersebut dengan berbagai contoh kasus yang telah disiapkan (DIPILIH SEBELUMNYA)

SKEMA/ALUR



Pentingnya Data dalam Analisis Kebijakan: Kemunculan Pendekatan Evidence Based Policy (EBP)

- ▶ Data merupakan komponen penting dalam analisis kebijakan karena data tersebut akan ditransformasikan menjadi informasi yang menjadi basis pengambilan keputusan. Data yang digunakan dalam analisis kebijakan dapat berupa angka atau kata-kata (narasi atau deskripsi tentang suatu kondisi).
- ▶ Riset adalah **KEGIATAN PENGUMPULAN DATA**, dapat dimaknai sebagai sebuah kegiatan merancang kebutuhan data dan mengembangkan metode untuk dapat memperoleh data yang dibutuhkan.
- ▶ **DATA HASIL** riset (analisis) sebagai bantuan analisis dalam memahami masalah publik

DATA HASIL RISET DAN REKOMENDASI

1. **DATA PRIMER:** jenis data yang dilihat dari cara memperolehnya, data tersebut dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari responden atau narasumber yang menjadi unit analisis dalam penelitian
2. **DATA SEKUNDER:** data yang sudah tersedia yang proses pengumpulannya dilakukan oleh orang lain. Wujud data sekunder dapat ditemukan dalam bentuk hasil penelitian maupun data statistik yang dikumpulkan oleh lembaga pemerintah maupun lembaga penelitian.
3. **PENGOLAHAN DATA HASIL RISET: DILAKUKAN** dengan cara mengurutkan, mengklasifikasikan, membandingkan, dan sebagainya. Hasil analisis data tersebut akan dapat membantu analisis kebijakan dalam membuat kesimpulan tentang suatu persoalan dan dalam memberikan rekomendasi untuk memecahkan masalah kebijakan.

PENDEKATAN: Evidence-Based Policy (EBP).

HISTORIS

- ❑ EBP dipopulerkan oleh pemerintah Tony Blair dari Partai Buruh di Inggris ketika mereka mengeluarkan white paper yang disebut sebagai the Modernising Government pada bulan Maret 1999 yang memproklamasikan komitmen pemerintah untuk memperbaiki kualitas pembuatan kebijakan.
- ❑ Secara lebih spesifik bagaimana upaya untuk menggunakan evidence guna memperbaiki kualitas perumusan kebijakan dalam white paper dikatakan: sangat jelas bahwa perumusan kebijakan harus didasarkan atas dukungan data (evidence) yang memadai. Unsur utama evidence adalah informasi. Kualitas perumusan kebijakan dengan demikian sangat ditentukan oleh kualitas informasi yang diperoleh dari: para ahli, berbagai penelitian yang sudah dilakukan baik oleh lembaga nasional maupun internasional, data statistik, konsultasi dengan para stakeholder, evaluasi dari kebijakan sebelumnya, riset-riset yang baru, data sekunder, atau berbagai data yang diperoleh dari internet

KELEMAHAN PENDEKATAN?

1. DATA HASIL PENELITIAN tidak selalu mampu mengungkapkan realitas kehidupan masyarakat yang kompleks DAN PENELITIAN STUDI KASUS (TIDAK GENERAL)
1. SISI PEMERINTAH: apakah pemerintah tulus atau tidak dalam memanfaatkan data hasil penelitian untuk mendukung proses perumusan suatu kebijakan.

MOTIF PEMERINTAH DALAM MEMANFAATKAN HASIL PENELITIAN (Nutley dan Webb,2000)

MOTIF

- (i) problem solving model DAN enlightenment model; model yang secara tulus memanfaatkan data untuk merumuskan masalah kebijakan dan opsi-opsi kebijakan secara akurat

- (i) tactical model DAN political model : tactical model dan political model, data hasil penelitian yang digunakan dalam perumusan kebijakan akan lebih banyak dipakai untuk mendukung posisi politik pemerintah yang sudah ditetapkan sebelumnya

RISET KEBIJAKAN

ADALAH:

kegiatan penerapan metode scientific (ilmiah) untuk memahami suatu fenomena alam maupun sosial. Metode ilmiah sendiri merupakan prosedur yang harus dilakukan oleh seorang peneliti untuk dapat menjelaskan suatu fenomena.

metode sebuah penelitian yang bersifat ilmiah akan dilakukan dengan tahapan:

- (i) merumuskan masalah yang hendak dijelaskan,
- (ii) membangun hipotesis,
- (iii) melakukan eksperimen/observasi,
- (iv) uji hipotesis, dan
- (v) penarikan kesimpulan dan generalisasi.

RISET (TUJUAN)

1. BERSIFAT DASAR (basic research) atau sering juga disebut riset teoritis (theoretical research) : mengembangkan teori (theory building) terkait dengan disiplin ilmu tertentu atau paling tidak dikaitkan dengan penemuan hal-hal yang baru terkait dengan disiplin ilmu tertentu.
1. BERSIFAT TERAPAN (applied research) bertujuan untuk memecahkan suatu persoalan tertentu (problem solving).

RISET KEBIJAKAN (TERAPAN) CIRI-CIRI:

1. Riset kebijakan dimaksudkan untuk merespon masalah publik tertentu;
2. Hasilnya dikaitkan dengan proses perumusan suatu kebijakan;
3. Pragmatis, menganalisis apa yang dapat diterapkan dan yang tidak;
4. Menjauhi hal-hal yang abstrak dan mengutamakan hal-hal yang mudah dipahami atau dikomunikasikan;
5. Digunakan untuk mempengaruhi pengambil kebijakan (tidak ditujukan semata-mata memuaskan rasa ingin tahu, akan tetapi untuk meyakinkan agar pengambil kebijakan mengikuti saran seorang analis kebijakan)

ELEMEN PENTING ANALIS KEBIJAKAN DALAM MELAKUKAN RISET KEBIJAKAN:

1. Fokus pada persoalan publik yang kontemporer atau sedang menjadi perhatian publik;
2. Dirancang sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan pengambil kebijakan;
3. Riset kebijakan membutuhkan tindakan yang cepat karena hanya tersedia sedikit waktu untuk melakukan pengumpulan data, analisis dan menyusun rekomendasi;
4. Pragmatis, rekomendasi harus merupakan hal yang dapat dikerjakan;
5. Tujuannya adalah untuk memperjelas persoalan publik yang rumit sehingga dapat diselesaikan;
6. Jembatan antara dunia teori dengan dunia praktis

DESAIN RISET KUANTITATIF DISESUAIKAN DENGAN RISET KEBIJAKAN

1. Menentukan topik:
2. Merumuskan masalah penelitian:
3. Metode penelitian (SURVEI DAN EKSPERIMENTAL)
4. Membangun Teori, Hipotesis dan Model:
5. Menentukan bentuk data dan skala pengukuran
6. Analisis data: Untuk mempermudah analisis data, maka seorang analis kebijakan perlu menguasai salah satu dari berbagai software pengolahan data statistik. Salah satunya adalah SPSS (Statistical Package for the Social Science).

DESAIN RISET KUALITATIF DISESUAIKAN DENGAN RISET KEBIJAKAN

1. Pengantar

Pernyataan masalah (termasuk literature review yang terkait dengan masalah yang akan diteliti tersebut); Tujuan penelitian; Pertanyaan penelitian; Keterbatasan penelitian.

2. Prosedur penelitian

Karakteristik penelitian kualitatif; Strategi penelitian; Peran peneliti; Prosedur pengumpulan data; Prosedur analisis data; Strategi validasi data; Struktur narasi; Mengantisipasi isu etika; Signifikasi studi; Temuan awal hasil penelitian pendahuluan; Hasil yang diharapkan; Lampiran.

TEHNIK PENYEDERHANAAN MASALAH (KOMPLEKS-SEDERHANA)

1. Data statistik yang dikeluarkan oleh BPS pada bulan September 2014 menyebutkan bahwa saat ini jumlah penduduk miskin di Indonesia adalah 27,7 juta jiwa (10,96%) dari total penduduk Indonesia);
2. Siapa dan dimana orang miskin tersebut berada?. Analisis kebijakan dapat menyederhanakan masalahnya dengan memasukkan variabel tempat tinggal, misalnya Desa vs Kota;
3. Berdasarkan data yang ada, jumlah penduduk miskin yang tinggal di pedesaan adalah 17,371,090 jiwa (67% dari total jumlah penduduk miskin di Indonesia), sementara yang tinggal di perkotaan adalah 10,356,690 jiwa (37% dari total jumlah penduduk miskin di Indonesia);

4. Jika analisis tersebut dilanjutkan lagi, dengan informasi bahwa 70% penduduk miskin yang tinggal di pedesaan adalah perempuan, maka masalah kebijakan yang harus dipecahkan menjadi semakin jelas, yaitu: penduduk miskin perempuan yang tinggal di pedesaan;

5. Dengan teknik analisis pembatasan masalah sebagaimana digambarkan di atas maka seorang analis akan dapat merumuskan dengan jelas apa masalah kebijakan yang harus dipecahkan. Setelah di dapat informasi yang jelas bahwa masalah yang harus dipecahkan adalah penduduk miskin perempuan yang tinggal di pedesaan maka analis kebijakan dengan lebih mudah dapat menguraikan: apa penyebab masalah tersebut muncul (apa variabel-variabel yang penting), bagaimana hubungan sebab-akibat antar berbagai variabel tersebut, dan pada akhirnya dengan lebih akurat dapat mengidentifikasi opsi-opsi kebijakan/program untuk menyelesaikan masalah kebijakan yang sudah terumuskan dengan jelas.

POINT PENTING

- ▶ BUKTI-BUKTI yang cukup maka seorang analis kebijakan akan mampu merumuskan masalah kebijakan yang tepat, mengidentifikasi opsi-opsi yang paling mungkin untuk dilakukan dengan perhitungan cost-benefit yang jelas, dan mengevaluasi apakah suatu kebijakan mampu memproduksi hasil sebagaimana diharapkan
- ▶ PENGGUNAAN DESAIN PENELITIAN KEBIJAKAN YANG COCOK : Menggunakan penelitian yang bersifat positivistik atau non-positivistik sangat tergantung pada pertanyaan riset yang akan dijawab.
- ▶ Pertanyaan penelitian yang terkait dengan hubungan sebab-akibat atau pertanyaan yang terkait dengan inferensi (penarikan kesimpulan) maka lebih cocok dijawab dengan penelitian positivistik atau kuantitatif.
- ▶ Pertanyaan penelitian yang bersifat eksploratif atau deskripsi tentang suatu kelompok masyarakat akan lebih tepat dijawab dengan penelitian yang bersifat non-positivistik atau kualitatif